

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah Sulaeman, 2010, *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Jala Permata Aksara.

Abdurrahman, 1991, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang, Bayumedia Publishing.

Andi Hamzah, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Pengayoman.

Dr. Djoni Sumardi Gozali, 2018, *Hukum Pengadaan Tanah*, Jakarta, UII Pers Yogyakarta.

Effendi Perangin, 1994, *Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta Raja, Grafindo.

Kukuh Achmadi, 1977, *Hukum Agraria*, Surabaya, Usaha Nasional.

Maria SW. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta, Kompas.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nurus Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung, PT Refika Aditama.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers.

Skripsi, Tesis:

Lustina Fajar P, Ertabambang Nahartyo, 2017, "Analisis Pengaruh Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap Nilai Tanah di Kabupaten

Gunungkidul” (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada Yogyakarta).

Nafi Rifarta, 2018, “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Museum Gunung Merapi ” (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Risqi Jefri Satria, 2019, “Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan Hotel di Kabupaten Sleman” (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Jurnal:

Agus Suntoro, “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 10. No. 2, Desember 2019.

Agus Surono, “Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume. 17, No. 4, Desember 2017

Budi Irawan, "Pengadaan Tanah Berdasarkan UU. No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Di Kabupaten Cilacap)", *Jurnal Idea Hukum*, Volume. 1, No. 2, Oktober 2015.

Martinus Siki, "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Masyarakat Desa Galuga Bogor Akibat Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Volume. 7, No. 2, Oktober 2015.

Nurhadi Susanto, “Refleksi Hukum Terhadap Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktu Jalan”, *Jurnal Komunikasi Hukum*”, Volume. 2. No. 2, Agustus 2016.

Rahmah Hidayati, “Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014)”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Volume. 3, No. 2, Oktober 2016.

Rahayu Subekti, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Yustisia*, Volume. 5, No. 2, Mei-Agustus 2016.

Salle, Hardianto Djanggih, “Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Pandecta*, Volume. 12, No. 2, Desember 2017

Tri Novitasari, Eko Prakoso, “Presepsi Masyarakat Kepesisiran Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Terhadap Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume. 5, No. 3, Januari 2016.

Valerian Christoper Mowoka, “Penentuan Besar Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, *Lex Privatum*, Volume. 5, No. 3, Mei 2017.

Internet:

Kompas, “Bantul Sediakan Rp 1,65 Miliar untuk Pembebasan Lahan JJLS”, <http://www.kompas.com>, diakses pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 pukul 01.30 WIB

Pengertian Pelaksanaan, Tanah dan Fungsi Sosial Tanah, <http://mangihot.blogspot.com/2017/02/pengertian-pelaksanaan-tanah-dan-fungsi.html>, diakses pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 23.15 WIB

Pengertian dan Fungsi Jalan, https://www.academia.edu/13691572/BAB_II_REVISI_BAB_II, diakses pada 17 Februari 2020 pukul 20.41 WIB

Dokumen Kenegaraan:

Republik Indonesia, 2016, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan JJLS Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Ruas Jalan Parangtritis-Girijati, Lembaran Negara RI Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral, Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015.

Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.